

Rizal: Bentuk Panja Aset

Pontianak, BERKAT.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, mengharapkan anggota DPRD Kalbar membentuk panja Aset atau pansus Aset, ini dilakukan untuk mengamankan aset milik daerah dan penilaian BPK terhadap APBD Kalbar setiap tahunnya bisa Wajar Tanpa Pengecualian bukan Wajar Dengan Pengecualian seperti sekarang ini, hanya dikarenakan aset yang belum diinventarisir dengan baik.

"Yang jelas masalah aset dan administrasinya adalah urusan Sekda Kalbar, termasuk mengkoordinir biro aset, sementara tugas Gubernur Kalbar adalah pada tataran kebijakan, tidak masuk keurusan teknis," jelas Rizal, kemarin usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalbar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. Prabasa Anantatur, mengatakan rencana anggota DPRD Kalbar untuk membentuk pansus memang sudah lama, sebelum masalah tanah KONI 6,4 hektar muncul kepermukaan, namun rencana tersebut terkesan dihalang-halangi Ketua DPRD Kalbar, Minsin, SH, dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Ini terbukti sampai tiga kali DPRD Kalbar mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, tidak juga ditanggapi hanya untuk dapat segera memberikan data dokumen kepada DPRD Kalbar berupa dokumen dasar penguasaan aset tanah yang disengketakan. Dokumen perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Kalbar dengan PT Citra Putra Mandiri (mulai MoU pertama tahun 2005 sampai terakhir)," kata Prabasa.

Prabasa juga menyayangkan pernyataan Gubernur Kalbar, Drs.

Cornelis di media bahwa sampai 100 kali pun surat DPRD Kalbar tidak akan dibalas kalau belum selesai.

"DPRD Kalbar mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kalbar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita hanya mau tahu isi perjanjian tersebut apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ini terkesan ditutup-tutupi sampai-sampai DPRD Kalbar mengeluarkan surat ke tiga, dokumen yang dipintakan belum juga diberikan," katanya.

Yang jelas Sekda Kalbar, Drs. M Zeet Hamdy Assovie, M. M, harus menjelaskan kepada DPRD Kalbar apakah ada dasar kebijakan Gubernur Kalbar untuk melepaskan aset KONI.

"Apapun jawaban eksekutif akan kita laporkan kepada Menda, ri, kalau ada unsur pidana maka silahkan aparat terkait melakukan proses penyelidikan mengenai aset KONI," paparnya.

Sementara itu sebelumnya, Ketua DPRD Kalbar, Minsin, SH, mengemukakan rencana Pansus Aset belum menjadi prioritas, karena yang menjadi objek aset itu tidak jelas aset yang mana yang akan dipansuskan. Tidak ada niat saya untuk menahan atau menghalang-halangi pembentukan pansus aset apabila dikehendaki anggota, yang penting aturan tetap dijalankan," tegas Minsin.

Menurut Minsin, data seluruh aset telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, kepada pimpinan DPRD Kalbar, dan lembaranya sangat tebal, kalau di foto copy butuh puluhan juta, apabila dibagikan kepada 55 anggota DPRD Kalbar.

"Makanya bagi anggota DPRD Kalbar yang butuh informasi mengenai aset silahkan di foto copy sendiri dan copynya ada dimeja saya," jelas Minsin. (aca)